



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2022
Juru Bicara : Ir. Hamam Muttaqim**

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya,

Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,

Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY,

Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Eksekutif,

Yang saya hormati, Seluruh rekan-rekan Wartawan dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY hari ini dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun.

Sidang Paripurna DPRD yang kami hormati.

Setelah mempelajari draft Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, maka Fraksi PAN menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

Maksud Penyusunan RPJMD DIY Periode 2017-2022 adalah menjabarkan visi misi Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY sebagaimana yang telah diantarkan

pada Pidato Gubernur DIY didepan Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY pada tanggal 2 Agustus 2017, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan DIY tahun 2017-2022.

Selain itu, RPJMD DIY tahun 2017-2022 dimaksudkan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah. Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2018-2022;
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2018 sampai tahun 2022;
- 3) Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah DIY antara tahun 2018 sampai tahun 2022;
- 4) Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis antara tahun 2017 sampai tahun 2022, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
- 5) Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- 6) Menjadi instrumen pelaksanaan **fungsi pengawasan DPRD** dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- 7) Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
- 8) Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

FPAN menyambut dengan baik isi dokumen RPJMD DIY 2017-2022 yang memuat kebijakan, strategi, program dan kegiatan Pemerintah DIY untuk masa lima tahun yang akan datang. Dokumen RPJMD telah memuat secara komprehensif tentang apa yang akan di kerjakan oleh pemerintah DIY berlandaskan pada pencermatan terhadap berbagai persoalan prioritas yang masih belum memenuhi target pada periode lima tahun yang lalu. Hal ini penting untuk kami kemukakan karena kita semua menginginkan bahwa berbagai persoalan yang belum mencapai harapan di periode yang lalu akan di selesaikan dengan segenap potensi yang di miliki DIY. FPAN sangat mengapresiasi berbagai capaian prestasi yang di ukur berdasarkan indicator kinerja Gubernur yang telah di sampaikan dalam dokumen RPJMD seperti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Umur Harapan Hidup (UHH), PDRB DIY yang tumbuh tinggi, inflasi yang rendah. demikian juga upaya untuk terus menekan angka kemiskinan sungguhpun masih cukup tinggi sampai dengan tahun 2016, namun harus di akui telah terjadi penurunan sejak tahun 2012 yang sebesar 16,05% menjadi 12,36% pada tahun 2017.

Namun FPAN mencermati bahwa masih ada berbagai persoalan prioritas yang belum sesuai dengan harapan kita antara lain; masih tingginya ketimpangan pendapatan yang di ukur dengan indeks Gini yang angkanya dalam kurun 5 tahun belum menunjukkan penurunan yang berarti. Indeks Gini pada tahun 2012 sebesar 0,417 menjadi 0,42 pada tahun 2016. Berikutnya adalah ketimpangan wilayah yang di ukur dengan indek Williamson, yang angka nya juga relative tetap dalam lima tahun. Angka nya pada tahun 2012 sebesar 0,4738 menjadi 0,4661 di tahun 2016. Angka penduduk miskin sekalipun sudah turun namun kami perlu tekankan di sini bahwa sampai dengan tahun 2017 masih terdapat 488.500 jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka ini turun sebesar 6.400 jiwa jika di dibandingkan dengan angka 2016.

FPAN juga mencatat sesuai data yang di paparkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022, bahwa berdasar pada hasil Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kesejahteraan warga DIY dari sisi pengeluaran warga sebagaimana di tuangkan dalam Tabel II.136. dari sisi pengeluaran terlihat bahwa warga DIY yang pengeluaran per bulan di bawah Rp 500.000 berjumlah 374.077 Rumah Tangga atau sebanyak (33,4%). Sebaliknya yang tingkat pengeluaran perbulan di atas Rp 500.000 berjumlah 746.400 rumah tangga. Hal ini juga bisa di lihat dengan melihat indicator lainnya seperti jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang datanya di sampaikan berjumlah 65.578 RTLH. hal yang sama bisa kita lihat juga dari data dinas sosial yang menyampaikan bahwa jumlah warga miskin dan

fakir miskin berjumlah 367.540 penyandang. Data lengkap ada di Tabel II.62. hal ini FPAN sampaikan untuk menjadi perhatian dan komitmen kita bersama bahwa untuk periode lima tahun mas Gubernur periode 2017 – 2022 berbagai persoalan prioritas tersebut dapat di atasi.

Sector pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian warga DIY juga perlu mendapatkan perhatian. Sector pertanian masih menyumbang 10,41% dari PDRB DIY. Berdasar parameter Nilai Tukar Petani (NTP) terlihat bahwa dari tahun ketahun nilai tukat petani terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukan bahwa kehidupan petani kita bertambah berat karena hasil dari usaha di bidang pertanian terus berkurang jika di dibandingkan dengan sector lainnya.

Di bidang kesehatan FPAN juga mencatat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang haru s di atasi antara lain. Angka kematian ibu (AKI) yang masih dalam kategori tinggi yakni 39 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Demikian juga pada parameter angka kematian bayi (AKB) yang sebesar 25 per 1000 kelahiran hidup serta Angka Kematian Balita (AKBA) yang mencapai 30 per 1000 kelahiran hidup. Kita semua tentu tidak suka dengan data bahwa di DIY masih terdapat balita yang termasuk kategori kurang gizi. Namun faktanya memang masih ada. Angka balita kurang energy protein atau KEP menunjukan kondisinya dalam lima tahun fluktuatif dari 7,91 pada tahun 2014 menjadi 8,83 pada tahun 2016. Perlu perhatian khusus untuk mengatasi masalah tersebut dan tidak bisa kita abaikan.

Di bidang pendidikan, DIY patut berbangga bahwa sebagai kota pendidikan banyak prestasi yang telah di raih DIY. Namun demikian FPAN masih melihat bahwa DIY masih bisa melompat lebih tinggi lagi. Misalnya dari sisi rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2010 angkanya 8,51 tahun dan naik menjadi 9,12 tahun pada 2016. Dengan kewenangan pendidikan menengah menjadi kewenangan propinsi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 maka kita harapkan bahwa angka rata-rata lama sekolah warga DIY akan meningkat. FPAN mengharapkan semua peserta didik warga DIY dapat menamatkan sekolah menengah baik SMA/MA maupun SMK. Dengan mendorong kearah sana masa depan warga DIY akan lebih baik. Salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan cara jalur pendidikan. Kemiskinan merupakan hambatan untuk menyekolahkan warga sampai jenjang menengah. Dengan bantuan pemerintah DIY bukan hal yang mustahil seluruh peserta didik warga DIY dapat menamatkan belajar sampai sekolah menengah.

Untuk melengkapi pandangan FPAN mengajukan beberapa pertanyaan dan klarifikasi sebagai berikut:

1. Apa strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah DIY untuk mengatasi kesejangan baik kesenjangan pendapatan maupun kesenjangan wilayah?
2. Dalam matrik sasaran RPJMD tabel VI.12 di sampaikan bahwa capaian kinerja pada akhir periode RPJMD adalah sebagai berikut; indek Gini 0,3635 dan angka kemiskinan 10,11%, jumlah penduduk miskin 401,230 ribu dan pengeluaran perkapita masyarakat sebesar Rp 14.593. bagaimana strategi, kebijakan dan program untuk mencapai sasaran kinerja tersebut?
3. Dengan belanja daerah yang di target sebesar Rp 6.648.781.389.000 (6.6 trilyun) apakah target kinerja sebagaimana di tuangkan dalam sasaran akhir periode RPJMD sebagaimana kami tanyakan dalam poin 2 di atas tidak menunjukan angka yang minimalisatau pesimistis?
4. Kebijakan dan program apakah untuk mengatasi terus menurunnya nilai tukar petani (NTP)
5. Apa yang akan di lakukan oleh pemerintah DIY untuk mengurangi atau menurunkan angka kematian ibu (AKI) angka kematian bayi (AKB) serta angka Kematian balita (AKBA)
6. Penderita penyakit menular seperti HIV AIDS jumlahnya terus bertambah. Data yang di laporkan sampai dengan tahun 2016 terdapat 3078 penderita yang 1.239 sudah memasuki fase AIDS?
7. Apa yang di lakukan oleh Pemda DIY untuk menekan laju konversi lahan produktif pertanian. Hal ini mengingat bahwa alih fungsi lahan sebesar 0,42% per tahun selama kurun (2006-2016)?
8. Jumlah toko modern terus bertambah selama kurun 2012 – 2016 dari 416 toko menjadi 777 toko. Sementara jumlah pasar tradisional relative tetap dari 333 pasar menjadi 349 pasar. Apa yang akan di lakukan oleh pemerintah untuk melindungi took-toko/kelontong milik warga dari serbuan toko modern berjejaring dann untuk melindungi keberadaan pasar tradisional?
9. DIY merupakan kota tujuan pendidikan terutama karena banyaknya perguruan tinggi yang ada di DIY. Namun melihat catatan tentang laporan kriminalitas menunjukan angka yang cukup tinggi, terutama terhadap kasus Napza. Hal ini bisa menurunkan animo masyarakat untuk menjadikan DIY sebagai kota tujuan pendidikan. Apa yang akan di lakukan

oleh Pemda DIY untuk menekan angka kriminalitas agar tidak berdampak pada animo tujuan pendidikan maupun pariwisata?

10. Di urusan perhubungan, DIY semakin hari semakin macet. Adanya sarana transportasi perkotaan *Buy the Service* belum mampu mengurangi kemacetan di sepanjang jalan di hampir semua sisi kota Jogjakarta. Bagaimana antisipasi pemda DIY untuk mengurangi dan mencegah agar DIY tidak bertambah macet dalam waktu 5 tahun yang akan datang?
11. Kemampuan keuangan Pemerintah DIY terus mengalami kenaikan yang signifikan. Belanja daerah di canangkan naik dari 5.1 trilyun pada tahun 2018 menjadi 6.6 trilyun pada tahun 2022. Dengan belanja langsung dari 3.09 trilyun menjadi 4.3 trilyun di tahun 2022. Bagaimanakah kebijakan belanja daerah akan dilakukan agar besarnya kemampuan keuangan daerah juga signifikan dalam mengatasi berbagai persoalan daerah?
12. Penetapan indikator kinerja utama DIY urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rancangan RPJMD 2017 – 2022 disebutkan bahwa prosentase penduduk berakses air minum pada tahun 2019 sebesar 88,71%. Sementara target pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PUPR sudah menetapkan 100% pada tahun 2019. Oleh sebab itu FPAN mendorong agar berbagai target indikator kinerja utama Pemda DIY dapat lebih agresif lagi dalam menyusun target, khususnya untuk penduduk berakses air minum pada 2019?
13. IKU DIY untuk presentase penduduk berakses sanitasi, pada rancangan RPJMD ditetapkan sebesar 91,58% pada tahun 2019 dan target 94,25% di tahun 2022. Sementara kita tahu bahwa target pemerintah pusat melalui kementerian PUPR pada tahun 2019 saja memasang target 100% penduduk berakses sanitasi yang layak pada 2019. FPAN mendorong agar dalam menentukan target capaian kinerja IKU utama Pemda DIY dapat lebih agresif lagi. Tidak hanya dalam urusan air minum dan sanitasi namun juga untuk IKU yang lainnya yang kami lihat dalam tabel matrik VI.12
14. FPAN juga mengapresiasi upaya Pemda DIY untuk merubah pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan dari model “*money follow function*” menjadi “*money follow program*”. Dan salah satu dampaknya adalah telah terjadi pengurangan jumlah kegiatan dari 2.809 di tahun 2014 terus berkurang menjadi 872 kegiatan di tahun 2016. Hal ini dengan tujuan untuk optimalisasi tujuan dan sasaran dari kegiatan. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang “*money follow program*” ini. Dan kenapa dalam laporan pengawasan masih di temukan banyaknya rekomendasi pada

tahun 2016 dari 34 SKPD yang ada. Di sampaikan bahwa pada tahun 2016 di temukan 345 temuan dan 799 rekomendasi. Dari jumlah tersebut 658 rekomendasi telah di tindaklanjuti dan masih ada 141 yang dalam proses. Mohon klarifikasi dengan banyaknya temuan dan rekomendasi kaitanya dengan model “ money follow program”.

15. Dari sisi pendapatan di sampaikan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 bahwa akan terjadi kenaikan yang signifikan dari sumber dana penyesuain dan otonomi khusus. Di perkirakan akan naik dari sekitar 1 Trilyun di tahun 2018 menjadi 1. 9 trilyun di tahun 2022. Mohon penjelasan dari angka dana tersebut berapa yang untuk dana keistimewaan. Dengan besarnya dana keistimewaan yang naik dari tahun ke tahun apa komitmen Pemerintah untuk masyarakat DIY mengingat bahwa tujuan keistimewaan DIY adalah untuk kesejahteraan rakyat DIY?
16. FPAN juga mengapresiasi realisasi belanja yang mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir yang secara prosentase mengalami perbaikan dalam penyerapan anggaran. Tahun 2012 di laporkan realisasi anggaran mencapai 89,88% terus naik menjadi 86,02% (2013) 85,99% (2014) 91,86% (2015) dan 95,25% (2016). Kami berharap angka realisasi penyerapan belanja daerah terus membaik sebagai bentuk kesiapan pemerintah dan OPD dalam menjalankan tugas pemerintahan.
17. Demikian juga untuk belanja modal yang proporsinya terus menunjukan kenaikan. Di sampaikan bahwa belanja modal tumbuh sebesar 44,79%. Semoga hal ini menunjukan semakin baiknya pengelolaan kebijakan belanja daerah.

Hadirin, Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian pandangan umum FPAN terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 untuk menjadi perhatian kita bersama. Kami mengajak kepada semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas Raperda ini agar nantinya benar-benar membawa kemanfaatan bagi rakyat DIY. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dari bapak/ibu/sdr sekalian dan kami mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2018

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SUHARWANTA, ST
KETUA

ARIF SETIADI, SIP
SEKRETARIS